



## **Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga terhadap Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2009—2020**

**Hilal Ramdhani<sup>(1)</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Siliwangi, Indonesia

<sup>1</sup>hilalramdhani@unsil.ac.id

---

### **Abstract**

*Democracy is a global trend that is widely applied by various third world countries, including Indonesia. The transition from an undemocratic government system to a democratic government system raises various challenges, especially from economic fluctuations which are an important part of the life of the nation and state. The small number of studies using a positivistic paradigm has resulted in the absence of cause-and-effect studies of the rise and fall of the Indonesian democracy index caused by macroeconomic fluctuations. This study uses a quantitative approach with ex post facto methods. The research data uses inflation, exchange rates, interest rates, and Indonesia's democracy index for 12 years from 2009—2020. The results show that this research model simultaneously influences the Indonesian democracy index by 79%, partially shows that inflation has no effect on the Indonesian democracy index, the exchange rate shows a positive effect on the Indonesian democracy index, and the Bank Indonesia interest rate has no effect on the Indonesian democracy index. This indicates that the increase and decrease in the exchange rate affects the Indonesian democracy index, so it is important for the government to be able to maintain the stability of the Indonesian exchange rate, because the higher the exchange rate, the higher the Indonesian democracy index.*

**Keywords:** *Inflation, Exchange Rates, Bank Indonesia Interest Rates, Democracy*

---

### **Abstrak**

Demokrasi merupakan tren global yang banyak diterapkan oleh berbagai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Transisi dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis menjadi sistem pemerintahan yang demokratis memunculkan berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama muncul dari fluktuasi ekonomi yang merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih sedikitnya penelitian yang menggunakan paradigma positivistik berakibat pada belum terungkapnya kajian yang bersifat sebab-akibat terhadap naik dan turunnya indeks demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh fluktuasi makroekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *ex post facto*. Data penelitian menggunakan inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan indeks demokrasi Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2009—2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia sebesar 79%, secara parsial menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia, nilai tukar menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks demokrasi Indonesia, dan suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kenaikan dan penurunan nilai tukar berpengaruh pada indeks demokrasi Indonesia sehingga penting bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas nilai tukar Indonesia. Hal itu dikarenakan semakin tinggi nilai tukar maka semakin tinggi pula indeks demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci:** *Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Bank Indonesia, Demokrasi*



## Pendahuluan

Di banyak negara di seluruh dunia, demokrasi saat ini sedang meningkat. Statusnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem politik Barat sekarang telah diterima sebagai milik komunitas global. Selain melekat pada negara dalam pengertian geografis yang tunggal dan terpusat, demokrasi juga masuk ke setiap "area" sebagai tren politik lokal dan sistem politik yang berasal dari status negara sebagai negara demokratis. Menurut keadaan, tradisi, dan budaya yang mendukungnya, demokrasi kini telah memengaruhi bagian-bagian tertentu dari politik masyarakat (Rahmatulloh, 2019; Rizam, dkk, 2022).

Ada kesepakatan luas bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diinginkan. Pada tahun 2008, Bappenas meluncurkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk memantau kemajuan negara menuju atau menjauh dari demokrasi secara teratur. Untuk sesuai dengan otonomi regional dan untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan politik jangka panjang di Indonesia, IDI berupaya mengukur penyebaran demokrasi di tingkat pusat maupun provinsi.

IDI mengevaluasi negara berdasarkan sistem, metode, prosedur, dan kinerja pemerintah sehubungan dengan masalah substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau masyarakat sipil secara keseluruhan. IDI tidak secara eksplisit mendefinisikan demokrasi dalam teksnya tetapi jelas bahwa IDI menganggap demokrasi sebagai pola interaksi antara negara dan masyarakat yang ditandai dengan distribusi kekuasaan yang adil. Hal ini diperjelas bahwa warisan kediktatoran Orde Baru harus diperhitungkan jika seseorang ingin memahami sistem demokrasi Indonesia. Kediktatoran Orde Baru adalah rezim totaliter yang tidak memungkinkan masyarakat sipil berfungsi secara bebas, terutama di ruang politik (Fajri, dkk, 2021).

Lebih lanjut, IDI bekerja untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Freedom House. Berdasarkan "indeks kebebasan" ini, Freedom House menciptakan indeks yang menempati urutan negara dengan tiga kriteria, yaitu hak-hak politik, kebebasan sipil, dan kekuatan lembaga-lembaga demokratis. Inti demokrasi dapat dilihat dalam dua poin pertama. Namun, mengingat kedua pilar ini, jelas bahwa sistem demokratis tidak dapat berfungsi sebaik mungkin tanpa dukungan struktur dan lingkungan politik yang ada dalam suatu negara.

Demokrasi Indonesia kemungkinan akan memburuk di tahun mendatang yang didasarkan pada analisis dari tiga laporan paling penting (EIU tahun 2020, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 dan 2021) jelas bahwa kualitas demokratis telah menurun secara signifikan, memengaruhi tidak hanya kebebasan sipil dan pluralisme (seperti kebebasan memberikan kritik pada pemerintah, kebebasan berpendapat, serta kebebasan membentuk organisasi akan rumit ketika kondisi negara dalam keadaan krisis ekonomi) tetapi juga kemampuan pemerintah untuk dibawa keluar dari tanggung jawab intinya. Secara khusus, pengurangan kebebasan berekspresi dan pemikiran telah disebut sebagai penyebab utama penurunan demokrasi Indonesia dalam publikasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia (Jati, 2021).

Penelitian Rahmatulloh (2019) menyatakan jika suatu wilayah atau negara ingin memiliki sistem politik berdasarkan demokrasi harus didukung oleh struktur demokratis yang baik, seperti pemerintah yang menjalankan demokrasi sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku, dan yang meminimalkan tindakan pejabat yang mengarah pada kebijakan anti-demokrasi dan pemerintah yang membahayakan kepentingan publik lainnya. Selain itu, prinsip-prinsip demokratis membutuhkan perilaku demokratis untuk tujuan menumbuhkan budaya demokratis di antara para pengikutnya.

Penelitian Fajri, dkk (2021) di Sumatera Barat, menunjukkan bagaimana demokrasi tampaknya memiliki kelemahan besar dari perspektif kebebasan sipil dan kelemahan kecil dari perspektif hak-hak politik. Investigasi lebih lanjut, bagaimana pun, mengungkapkan bahwa kinerja administrasi dan legislatif, serta interaksi antara keduanya adalah tempat demokrasi Sumatra Barat mengalami masalah.

Keadaan demokrasi yang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir dalam paradigma positivistik pasti dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti pemilu, kebebasan, kesetaraan, kapasitas lembaga demokrasi, maupun krisis ekonomi. Dalam penelitian ini fokus mengkaji sebab dari perubahan makroekonomi. Secara konseptual, peningkatan harga umum dan persisten dikenal sebagai inflasi (Iskandar & Subekan, 2017; Yanescha, 2022; Lim & Sek, 2015). Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum diberbagai barang dan jasa. Inflasi ekonomi terjadi ketika ada tren kenaikan yang terus-menerus dalam penetapan harga di seluruh produksi untuk barang dan jasa di suatu negara. Ini karena ada ketidaksesuaian dalam pertukaran sumber daya. Harga diatur oleh penawaran dan permintaan yang merupakan pengetahuan umum dan salah satu dari sedikit topik ekonomi di mana ada konsensus.

Menurut Basit & Haryono (2021), inflasi dapat berdampak pada situasi politik dan pemerintah. Ini adalah dampak inflasi, yakni akan berdampak negatif pada pendapatan masyarakat yang memiliki pendapatan tetap dan masyarakat yang mengumpulkan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Masyarakat yang mendapatkan keuntungan dari inflasi adalah mereka yang pendapatannya tumbuh dengan proporsi yang lebih besar dari tingkat inflasi, atau mereka yang aset non-moneter meningkat nilainya dengan persentase yang lebih besar dari tingkat inflasi. Selain itu, inflasi menyebabkan peningkatan permintaan barang tertentu yang lebih tinggi daripada barang-barang lain. Inflasi dapat menyebabkan alokasi komponen produksi yang tidak efektif.

Produksi mungkin tumbuh karena inflasi. Biasanya, kenaikan harga produk mendahului kenaikan gaji, menghasilkan peningkatan laba pemilik bisnis. Kenaikan pendapatan ini akan merangsang pertumbuhan produksi. Namun, jika tingkat inflasi cukup tinggi, mungkin memiliki konsekuensi sebaliknya, yang merupakan pengurangan produksi. Menurut Sukirno (2011), terdapat banyak strategi untuk memerangi inflasi, yaitu a) dengan menaikkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dilakukan, b) kebijakan moneter diimplementasikan melalui peningkatan suku bunga dan pembatasan pinjaman, dan c) mengambil tindakan untuk menurunkan biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti menghapus bea masuk, menetapkan harga, meningkatkan produksi, dan mendorong kemajuan teknologi.

Aspek makroekonomi selain inflasi, yakni nilai tukar mata uang antara dua negara yang merupakan nilai dimana warga negara memperdagangkan mata uangnya masing-masing satu sama lain (Syahputra, 2017; Bahmani-Oskooee, 2020; Chamoso, dkk, 2019). Nilai tukar mata uang mengacu pada penilaian mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Widjajanto, Sutrisno, & Anita, 2020). Titik ekuilibrium nilai tukar ini ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap mata uang yang terlibat.

Fluktuasi mata uang suatu negara dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik (Cooper, 2019; Demir, 2019). Penyesuaian ini terjadi ketika mata uang lokal meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang asing, dan menurun ketika mata uang domestik mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang asing. Pemerintah, khususnya Bank Sentral, melakukan intervensi dengan memanipulasi nilai mata uang sesuai dengan kondisi pasar, baik dengan menurunkan atau menaikkannya (Mundaca, 2018; Akdogan, 2020). Devaluasi dan revaluasi adalah ungkapan yang mengacu pada pengurangan atau peningkatan intervensi pemerintah.

Devaluasi mengacu pada penurunan nilai tukar yang disengaja oleh Bank Sentral, sedangkan revaluasi mengacu pada kenaikan nilai tukar yang disengaja oleh Bank Sentral.

Nilai tukar dalam setiap transaksi internasional mengacu pada jumlah mata uang lokal yang perlu ditukar dengan satu unit mata uang cadangan atau mata uang acuan (Ito & McCauley, 2020). Biasanya, dolar AS atau pound Inggris berfungsi sebagai mata uang standar karena dikenal luas di beberapa negara dan digunakan untuk menentukan biaya lokal bagi konsumen internasional.

Monetisasi yang penting bagi perekonomian suatu negara yakni suku bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter suatu lembaga dan tersedia untuk umum. Suku bunga Bank Indonesia diumumkan setiap bulan dalam Rapat Dewan Gubernur dan digunakan oleh Bank Indonesia dalam operasi moneter untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang dan mencapai tujuan operasional kebijakan moneter. Suku bunga berperan penting dalam membentuk pilihan individu untuk berinvestasi atau menabung (Adityandani & Haryono, 2019; Prihanto, 2017). Jika ada individu dalam suatu perekonomian yang menghasilkan surplus atas kebutuhan konsumsinya, dana tambahan tersebut akan disebar atau disimpan.

Tujuan operasional kebijakan moneter tercermin dari perubahan harian suku bunga di pasar uang antarbank. Penyesuaian suku bunga pasar uang antarbank (PUAB) dirancang untuk dibarengi dengan penyesuaian suku bunga deposito dan selanjutnya suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia biasanya akan menaikkan Suku Bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi lainnya. Sebaliknya Bank Indonesia (BI) akan menurunkan suku bunga atau BI Rate ketika inflasi di masa depan diperkirakan turun di bawah target yang telah ditentukan (Kasmir, 2007).

Suku bunga Bank Indonesia berkorelasi dengan kinerja perekonomian Indonesia (Tammu, 2020). Fluktuasi suku bunga BI memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk suku bunga perbankan dan harga barang-barang kebutuhan pokok. BI rate berfungsi sebagai acuan dalam hubungan Bank Indonesia dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra internasional. Suku bunga BI mempunyai beberapa peran penting, antara lain Inflasi tinggi yang tidak terkendali dapat menyebabkan kebangkrutan suatu negara. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peredaran uang yang berlebihan dan ketidakseimbangan antara permintaan dan

penawaran suatu barang atau jasa. Suku bunga BI berperan penting dalam menjamin stabilitas dan kemajuan perekonomian negara dengan mengendalikan aliran uang di masyarakat (Setyaningrum, 2021).

Selama periode perlambatan ekonomi akibat perang dagang Amerika-China pada rentang waktu 2007—2008, bank sentral mungkin menerapkan strategi penurunan suku bunga untuk memberikan insentif kepada pengusaha dan investor agar meminjam uang dengan tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatur kecenderungan individu terhadap konsumsi berlebihan, menaikkan suku bunga pendapatan dasar berdampak pada penurunan biaya produk dan jasa sehingga merangsang kecenderungan pembelian masyarakat.

Atas dasar itu menunjukkan bahwa makroekonomi memiliki aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena penurunan dan kenaikan makroekonomi berdampak pada keseluruhan kegiatan ekonomi yang menjadi pemicu berbagai kegiatan politik di masyarakat sehingga penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor makroekonomi (inflasi, nilai tukar, dan suku bunga) terhadap Indeks Demokrasi Indonesia.

### Metode

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, dan penulis menggunakan metode *ex post facto* dengan berusaha mengidentifikasi alasan yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang dihasilkan dari suatu peristiwa atau hal-hal yang telah menghasilkan perubahan dalam variabel independen sebagai keseluruhan (Widarto, 2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif asosiatif untuk memberikan penjelasan yang terorganisir, faktual, dan benar tentang fakta dan hubungan antara variabel yang dianalisis. Objek dalam penelitian ini ialah data makroekonomi (inflasi, nilai tukar, dan suku bunga) serta Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang, meliputi 3 aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Sementara itu, variabel dependen, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia.

Variabel	Konsep Variabel	Skala	Sumber
Inflasi	Individu, bisnis, dan pemerintah semua dipengaruhi oleh kenaikan harga umum secara terus menerus.	Rasio	Meyer, Prescott, & Sheng (2022)
Nilai Tukar	Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.	Rasio	Edwards (2019)
Suku Bunga Bank Indonesia	Tingkat kebijakan moneter yang ditetapkan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia.	Rasio	Sasongko & Huruta (2018)
Indeks Demokrasi	Alat ukur obyektif dan	Rasio	BPS (2014)

---

Indonesia empirik terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia

---

**Tabel 1. Operasional Variabel**

Populasi dalam penelitian ini ialah data inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan indeks demokrasi Indonesia. Sampel dalam penelitian ini ialah inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan indeks demokrasi Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2009—2020. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan lienaritas. Selanjutnya, setelah data lolos uji asumsi klasik dilakukan uji regresi berganda.

## Hasil dan Diskusi

### Hasil dan Pembahasan

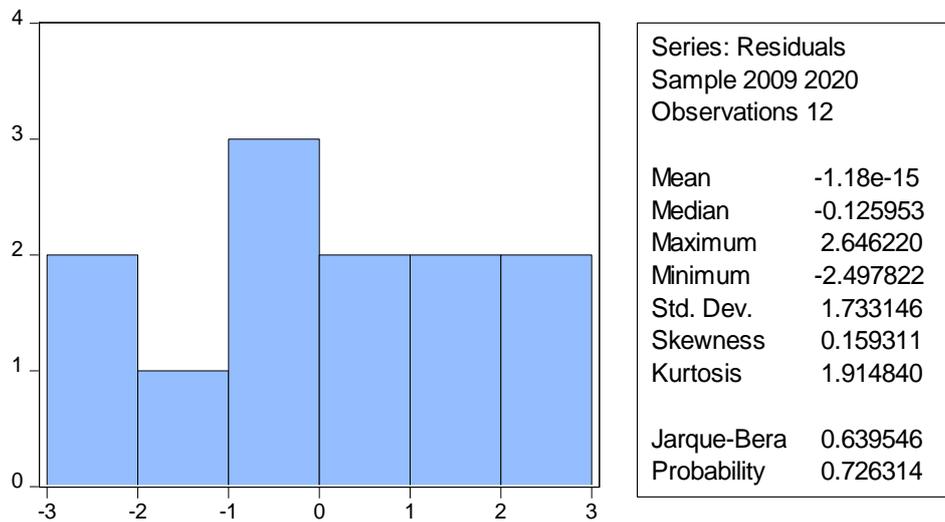
#### 1. Deskripsi Data Penelitian dan Uji Asumsi Klasik

	Inflasi	Nilai_Tukar	Suku_Bunga	IDI
Mean	4.589167	11.97717	5.987500	69.27750
Median	4.590000	12.65100	6.000000	71.10000
Maximum	6.970000	14.64500	7.540000	74.92000
Minimum	2.040000	8.823000	4.250000	62.63000

**Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian**

Berdasarkan data tersebut menunjukkan selama 2009—2020, inflasi Indonesia paling rendah, yaitu 2,04 dan paling tinggi 6,97 dengan rata-rata sebesar 4,58. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selama 2009—2020, nilai tukar Indonesia paling rendah, yaitu Rp8.823,00 dan paling tinggi Rp14.645,00 dengan rata-rata sebesar Rp11.977,00. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selama 2009—2020, suku bunga Indonesia paling rendah, yaitu 4,25 dan paling tinggi 7,54 dengan rata-rata sebesar 5,98. Berdasarkan data tersebut menunjukkan selama 2009—2020, indeks demokrasi Indonesia (IDI) paling rendah, yaitu 62,63 dan paling tinggi 74,92 dengan rata-rata sebesar 69,27.

Sebelum melakukan uji regresi berganda, dalam penelitian ini terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data penelitian layak diujikan atau tidak pada tahap regresi berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan run test, serta uji linearitas.



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Nilai Prob. JB hitung sebesar 0,726314 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

F-statistic	0.897066	Prob. F(3,8)	0.4836
Obs*R-squared	3.020651	Prob. Chi-Square(3)	0.3885
Scaled explained SS	1.357066	Prob. Chi-Square(3)	0.7156

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

Nilai Prob. F hitung sebesar 0,4836 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	40.26212	116.9782	NA
Inflasi	0.698754	47.14237	4.386094
Nilai_Tukar	0.117334	50.40922	1.505555
Suku_Bunga	1.275726	136.4455	3.566415

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk semua variabel tidak ada yang lebih dari 5. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

F-statistic	2.090986	Prob. F(1,7)	0.1914
Obs*R-squared	2.760078	Prob. Chi-Square(1)	0.0966
R1			9.000000
R2			0.225872

**Tabel 5. Uji Autokorelasi dan Run Test**

Nilai Prob. F(1,7) sebesar 0,1914 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Selain itu, hasil uji run test menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) uji Run Test sebesar 0,225872 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

	Value	df	Probability
t-statistic	0.221765	7	0.8308
F-statistic	0.049180	(1, 7)	0.8308
Likelihood ratio	0.084014	1	0.7719

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.230522	1	0.230522
Restricted SSR	33.04175	8	4.130219
Unrestricted SSR	32.81123	7	4.687319

LR test summary:

	Value
Restricted LogL	-23.10445
Unrestricted LogL	-23.06245

**Tabel 6. Uji Linearitas**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan Nilai Prob. F hitung pada baris F-statistic kolom Probability sebesar 0,8308 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.

## 2. Uji Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.20003	6.345244	6.335458	0.0002
Inflasi	-0.301441	0.835915	-0.360612	0.7277
Nilai_Tukar	1.971873	0.342541	5.756606	0.0004
Suku_Bunga	1.142944	1.129480	1.011920	0.3412
R-squared	0.854332	Mean dependent var		69.27750
Adjusted R-squared	0.799706	S.D. dependent var		4.541013
S.E. of regression	2.032294	Akaike info criterion		4.517409
Sum squared resid	33.04175	Schwarz criterion		4.679045
Log likelihood	-23.10445	Hannan-Quinn criter.		4.457566
F-statistic	15.63977	Durbin-Watson stat		2.884114
Prob(F-statistic)	0.001041			

**Tabel 7. Uji Regresi Berganda**

Berdasarkan data tersebut menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia sehingga naik atau turun nya inflasi tidak akan berdampak pada indeks demokrasi Indonesia. Nilai tukar menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks demokrasi Indonesia, artinya semakin tinggi nilai tukar pada semakin tinggi pula indeks demokrasi Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia, sehingga naik atau turun nya Suku bunga Bank Indonesia tidak akan berdampak pada indeks demokrasi Indonesia. Model penelitian ini secara simultan berpengaruh sebesar 79% terhadap indeks demokrasi Indonesia. Artinya, IDI dapat diprediksi naik maupun turunnya dengan akurasi 79% dari faktor makroekonomi, hal ini menandakan bahwa penting bagi pemerintah untuk dapat menstabilkan kondisi makroekonomi agar IDI tetap stabil dan tidak mengalami penurunan.

## 3. Pembahasan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh makroekonomi terhadap indeks demokrasi Indonesia sejauh pencarian berbagai penelitian terdahulu di Indonesia belum banyak yang spesifik menggunakan kuantitatif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini berkontribusi menghasilkan temuan atau *novelty* bahwa selama tahun 2009—2020 hanya nilai tukar yang memiliki pengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia karena belum ada penelitian yang menggunakan paradigma positivistik yang mengkaji keterkaitan makroekonomi dengan indeks demokrasi. Hasil penelitian ini menandakan semakin baik nilai tukar Indonesia, maka indeks demokrasi Indonesia juga akan semakin baik. Menjaga dan memperkuat nilai tukar perlu adanya dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat agar terwujud kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Korelasi antara ekonomi dan demokrasi merupakan aspek integral dari berfungsinya suatu negara dan tidak dapat dipisahkan. Di masa krisis, seringkali muncul isu-isu yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti keterlibatan militer yang proaktif pada berbagai kerusuhan di masyarakat akibat permasalahan ekonomi (misal krisis moneter 1998) yang menggunakan militer sebagai upaya pemerintah meredam kerusuhan. Kecenderungan pemerintah untuk segera meningkatkan perekonomian telah mengangkat militer sebagai elemen penting dalam membangun ketertiban sosial. Meski demikian, pemanfaatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan arahan tersebut bertentangan dengan prinsip netralitas TNI yang fokus utamanya pada urusan pertahanan (Jati, 2021). Menurunnya indeks demokrasi dapat disebabkan oleh adanya pergerakan dalam kehidupan demokrasi yang berpusat pada prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam sistem demokrasi, wabah covid-19 yang telah terjadi menghadirkan peluang yang menguntungkan bagi kelangsungan kekuasaan melalui hubungan kekeluargaan. Keadaan sosial dan ekonomi yang bergejolak dan tidak menentu telah mengakibatkan kurangnya legitimasi bagi pemegang jabatan untuk mengangkat anggota keluarga mereka. Sistem bantuan sosial tampaknya dimanfaatkan sebagai sarana menggalang dukungan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap kerapuhan sektor pemerintahan adalah ketergantungannya pada pengaruh dan pesona elit (Jiang, 2023).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada bidang sosial dan ekonomi (Clemente-Suárez, dkk, 2021). Dampak pandemi terhadap kedua sektor ini telah menimbulkan situasi yang meresahkan dalam demokrasi Indonesia saat ini. Selain berkurangnya otonomi yang berujung pada manifestasi intoleransi (seperti adanya berbagai pelaporan atas individu atau organisasi karena alasan identitas), faktor penentu utamanya adalah tidak adanya koherensi dalam pemerintahan akibat ulah elite politik. Persoalan inkonsistensi dan intoleransi dapat diringkas secara ringkas dengan mengkaji tiga aspek utama: pengaruh militer yang meluas dalam kehidupan publik, perpecahan masyarakat berdasarkan ideologi, dan maraknya dinasti politik (Fealy, 2020; Federico & Malka, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh terhadap indeks demokrasi, karena secara empiris devaluasi rupiah menimbulkan dilema bagi Bank Indonesia (BI), lembaga yang membidangi moneter dalam negeri. Bekerja sama dengan pemerintah, BI secara aktif berupaya menstabilkan nilai rupiah yang semakin menurun

dan menghindari devaluasi. Akibat nilai tukar rupiah yang memburuk, maka perlu adanya kenaikan suku bunga. Hal yang paling menonjol adalah perlambatan ekspansi kredit. Masyarakat enggan memperoleh pinjaman karena suku bunga yang selangit. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa kredit bermasalah akan meningkat akibat kenaikan suku bunga.

Depresiasi nilai tukar rupiah pun berdampak pada perdagangan obligasi dan surat utang negara (SUN) (Rosalyn, 2018). Obligasi dan SUN yang diperoleh akan didivestasi akibat nilai tukar rupiah yang tidak menguntungkan. Jika tidak ada pembelian obligasi atau SUN, keadaan akan semakin buruk. Harga obligasi dan SUN ke depan diperkirakan akan mengalami penurunan dan diperkirakan akan memengaruhi nilai tukar rupiah. Dalam skenario ini, Bank Indonesia (BI) akan bereaksi dengan membeli obligasi dan SUN (Surat Utang Negara) yang dijual investor asing. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas di pasar keuangan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan IDI yang terkait dengan aspek kapasitas lembaga demokrasi untuk bertindak secara optimal dalam proses pelayanan publik.

Inflasi impor mengacu pada situasi ketika penurunan nilai mata uang menyebabkan kenaikan harga barang konsumsi yang diimpor. Saat ini, Indonesia melakukan impor beberapa bahan pangan, antara lain gandum, kedelai, jagung, dan daging. Selain itu, Indonesia juga mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar. Depresiasi nilai tukar rupiah akan semakin berdampak pada pasar keuangan, terutama pada pembayaran kupon, dividen, dan bunga kepada investor internasional, karena dolar AS cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa nilai tukar merupakan aspek penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan kualitas demokrasi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hanya nilai tukar yang berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia, sedangkan inflasi dan suku bunga tidak berdampak pada indeks demokrasi Indonesia. Nilai tukar sebagai makroekonomi memiliki pengaruh positif, artinya semakin tinggi nilai tukar maka indeks demokrasi Indonesia semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan nilai tukar yang berubah berdampak besar pada seluruh kegiatan perekonomian negara, sehingga dapat mengganggu stabilitas negara yang terekam dalam keadaa indeks demokrasi Indonesia.

## **Pendanaan dan Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini sepenuhnya berasal dari pendanaan mandiri, sehingga tidak melibatkan pihak atau instansi manapun. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada rekan-rekan dosen Universitas Siliwangi yang menjadi mitra diskusi serta mahasiswa yang mengontrak mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan riset menggunakan pendekatan kuantitatif.

## **Referensi**

- Adityandani, W., & Haryono, N. A. (2019). Pengaruh demografi, financial attitude, financial knowledge, dan suku bunga terhadap perilaku menabung masyarakat Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 7(2), 316-326.
- Akdogan, I. U. (2020). Understanding the dynamics of foreign reserve management: The central bank intervention policy and the exchange rate fundamentals. *International Economics*, 161, 41-55.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). Indeks Demokrasi Indonesia Nasional 2013 sebesar 63,68 dari Skala 0 sampai 100. [online]. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2014/07/04/976/indeks-demokrasi-indonesia-nasional-2013-sebesar-63-68-dari-skala-0-sampai-100.html>
- Bahmani-Oskooee, M. (2020). The J-Curve and the Effects of Exchange Rate Changes on International Trade. In *Encyclopedia of International Economics And Global Trade: Volume 2: International Money and Finance* (pp. 297-319).
- Basit, A., & Haryono, S. (2021). Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh Stabilitas Politik dan Faktor Ekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 220-237.
- Chamoso, P., González-Briones, A., Rivas, A., De La Prieta, F., & Corchado, J. M. (2019). Social computing in currency exchange. *Knowledge and Information Systems*, 61(2), 733-753.
- Clemente-Suárez, V. J., Navarro-Jiménez, E., Moreno-Luna, L., Saavedra-Serrano, M. C., Jimenez, M., Simón, J. A., & Tornero-Aguilera, J. F. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on social, health, and economy. *Sustainability*, 13(11), 6314.
- Cooper, R. N. (2019). Currency devaluation in developing countries. In *The International Monetary System* (pp. 183-211). Routledge.
- Demir, C. (2019). Macroeconomic determinants of stock market fluctuations: The case of BIST-100. *Economies*, 7(1), 8.
- Edwards, S. (2019). Real Exchange Rates in Developing Countries Concepts and Measurement<sup>1</sup>. In *International financial markets and agricultural trade* (pp. 56-108). CRC Press.
- Fajri, H., Wahyuni, N., Saputra, B., & Maani, K. D. (2021). Demokrasi Pincang: Analisis terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 108-128.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 era: Repressive pluralism, dynasticism and the overbearing state. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323.
- Federico, C. M., & Malka, A. (2018). The contingent, contextual nature of the relationship between needs for security and certainty and political preferences: Evidence and implications. *Political Psychology*, 39, 3-48.

- Iskandar, A., & Subekan, A. (2017). Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 109-126.
- Ito, H., & McCauley, R. N. (2020). Currency composition of foreign exchange reserves. *Journal of International Money and Finance*, 102, 102104.
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *THC Insights*, (27).
- Jiang, Q. (2023). The influence of the social contract on the stability of Moroccan society after its Independence. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 1-21.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lim, Y. C., & Sek, S. K. (2015). An examination on the determinants of inflation. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 678-682.
- Meyer, B. H., Prescott, B., & Sheng, X. S. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on business expectations. *International Journal of Forecasting*, 38(2), 529-544.
- Mundaca, G. (2018). Central bank interventions in a dollarized economy: managed floating versus inflation targeting. *Empirical Economics*, 55, 1507-1535.
- Prihanto, H. (2017). Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Untuk Menabung Di Bank Syariah. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 10(1), 1-26.
- Rahmatulloh, R. (2019). Wajah Demokrasi Jakarta dalam Potret Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 18(2), 112-145.
- Rizam, B. N. S. R., Izzati, A. R. S., Naomi, C., & Kartagunawan, A. H. (2022). Studi Penggunaan Media Sosial sebagai Wadah Penyelenggaraan Demokrasi oleh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 13-24.
- Rosalyn, A. M. (2018). The effect of rupiah exchange rate and inflation rate towards composite stock price index in Indonesia stock exchange. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 78(6), 53-58.
- Sasongko, G., & Huruta, A. D. (2018). Monetary policy and the causality between inflation and money supply in Indonesia. *Verslas: Teorija ir praktika/Business: Theory and Practice*, 19, 80-87.
- Setyaningrum, T. A. (2021). Apakah bank indonesia rate memoderasi transaksi non tunai dan jumlah uang beredar?. *AKUNTABEL*, 18(1), 136-145.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Tammu, R. G. (2020). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2014–2018. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(1), 62-66.
- Widarto, M. P. (2013). *Penelitian Ex Post Facto*. Fakultas Teknik: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widjajanto, T., Sutrisno, S., & Anita, T. (2020). Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Expor Total Indonesia. *Sosio e-Kons*, 12(02), 184-194.
- Yanescha, N. Y. P. (2022). Analysis of Factors Affecting Inflation in Indonesia 2015-2020. *Research Horizon*, 2(2), 330-344.